



Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

# RENJA

Rencana Kerja

# 2024

**Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Penelitian Pengembangan Daerah**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat dan ridho Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat dilaksanakan dengan baik. Renja Bappeda Provinsi ini merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dimana berpedoman pada renstra Bappeda untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Bappeda tahun lalu dan hasil evaluasi renja Bappeda tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja bappeda dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda.

Demikian dokumen rancangan renja ini dibuat, kemudian akan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 2023

KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja.....	I-5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA.....	II-9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA.....	II-12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA.....	III-2
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

## **DAFTAR TABEL**

No	<i>Judul</i>	Hal
II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-3
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-10
III.1	Sasaran dan Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Tahun 2023	III-3
IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-8

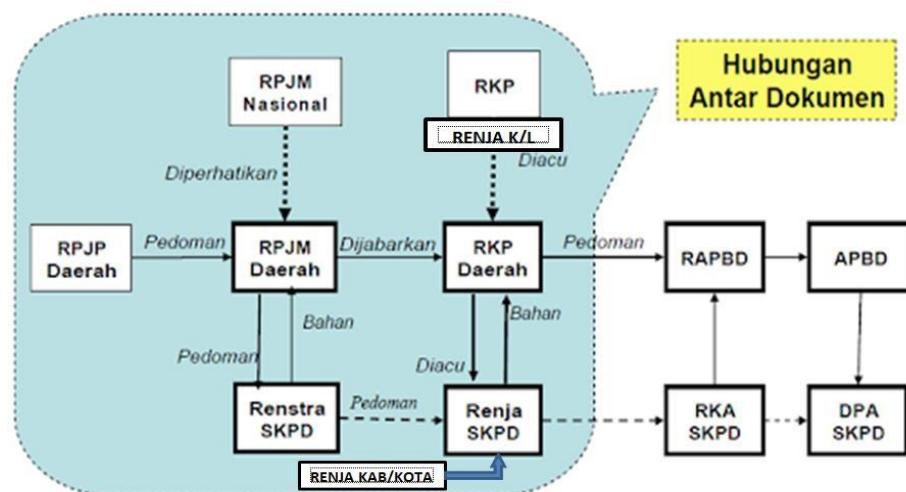
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar I.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Renja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BAPPEDA) Tahun 2024 memiliki makna yang strategis dari Renstra Tahun 2023-2024 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tahapan penyusunan renja diatas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rancangan renja untuk tahun 2024.

Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 menjadi bahan penelaahan penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai dasar penyusunan rancangan KUA PPAS Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda.

Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja BAPPEDA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja PD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

### 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2022 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

## **1.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA**

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPPEDA; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara BAPPEDA Provinsi dengan BAPPEDA kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapepda.

## **1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

## **1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

# **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BAPPEDA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BAPPEDA serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian. Dengan memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2022 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perubahan RKPD tahun 2022 maka Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencakup 4 program dan 17 kegiatan.

Untuk target kinerja kegiatan menyesuaikan hasil refocussing kegiatan dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2022. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dapat diketahui bahwa Bappeda Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke IV sebesar 98,04 % dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 95,06 % dengan predikat Sangat Tinggi (T).

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat SAKIP Bappeda (Predikat)	92,00	82,00				83,24	83,41	90,67%
		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Predikat)	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00%
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip PD/Bappeda ( Presentase)	83,33		83,27	83,27	100,00%	83,33	83,33	100,00%
		Survey kepuasan pelayanan keuangan (Persentase)	80		75	75	100,00%	80	80	100,00%
<b>Perencanaan</b>										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
2	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Percentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG (Persen)	100,00	85,00					87,50	87,50%
		Percentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persen)	85,00	70,00					72,50	85,29%
		Percentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD (Persen)	100,00	85,00					87,50	87,50%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Percentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100,00		100	100	100	100,00	100,00	100,00%
		Percentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	70,00		90	90	100	70,00	70,00	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
3	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayah yang ditindaklanjuti (Persentase)	100,00	85,00					87,50	87,50%
		Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayah yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00	90,00					90,00	100,00%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100,00		100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
		Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD	90,00		90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
4	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00	90,00					90,00	100,00%
		Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti (Persentase)	90,00	90,00					90,00	100,00%
5	Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang sosial budaya dan pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00	90,00				180,00	200,00%	2,22%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti (Persentase)	90,00	75,00						
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
6	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan (Persentase)	80,00	80,00	80	80	100%	80,00	80%	100%

Sumber Data: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tabel II.1) diatas, dapat disajikan bahwa terdapat evaluasi berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 untuk sandingan evaluasi Renja Tahun 2022 dan sandingan evaluasi Renja perkiraan Tahun 2023.

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja dan keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pelaksanaan menjadi terlalu singkat;
2. Lamanya ditetapkan Perubahan APBD sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih menunggu penetapan tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2023, prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2022 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada RENSTRA BAPPEDA tahun 2023-2026, maka rencana program dan kegiatan BAPPEDA tahun 2023 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA BAPPEDA. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka tujuan penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kinerja perencanaan sebagai upaya mencapai target kinerja BAPPEDA;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
3. Mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan BAPPEDA adalah sebagai "Pengarah". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

**Tabel II.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan/Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	-	Jumlah program dalam RKPD/ Total Jumlah Program pada tahun rencana yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti x 100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra 2017-2022
2	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	-	Jumlah Renstra Perangkat daerah yang baik/ Total jumlah renstra perangkat daerahx1 00%	80%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	95% Renstra 2017-2022
3	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi		Jumlah capaian sasaran pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target / Total sasaran pembangunan daerah dalam RPJMDx1 00%	90%	85%	85%	85%	72,72%	85,19%	92,59%	95% Renstra 2017-2022

4	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	-	Jumlah capaian program pada renstra yang mencapai target/jumlah total program pada RPJMD yang dilaksanakan 100%	80%	80%	85%	90%	83,66%	84,3%	90,99%	90%	Renstra 2017-2022
---	--	---	---	-----	-----	-----	-----	--------	-------	--------	-----	-------------------

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, BAPPEDA memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah BAPPEDA memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah maka BAPPEDA memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

### **2.3.1 Permasalahan dan Solusi**

Kendala dan permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2022 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang telah dikembangkan.
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid, dan mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan kebijakan.
5. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan kerjasama dengan pihak terkait (Badan Pusat Statistik, Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dalam Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menyediakan data dan informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Telah memberikan masukan dan saran kepada Gubernur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan percepatan dalam mengisi jabatan fungsional perencana, penelitian dan pengembangang dan analis kebijakan publik di lingkungan BAPPEDA. Sedangkan berkenaan dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas pegawai, BAPPEDA mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekruitmen maupun pindahan dari unit kerja lain;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda dilingkup PD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat untuk memperoleh informasi yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a) Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b) Melaksanakan sinkronisasi terhadap pembangunan yang terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar daerah melalui kerjasama dalam sektor pembangunan.
4. Telah dilakukan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota, seperti melaksanakan monitoring dan meninjau ke lapangan proyek-proyek pembangunan, melakukan pertemuan rutinitas setiap triwulan dengan seluruh PD dalam mengevaluasi ketercapaian pembangunan daerah, mengoptimalkan peran musrenbang dari tingkat desa sampai pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
5. Mendorong berkembangnya pemahaman mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab di lingkungan kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga mengedepankan sinergi yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah melalui upaya :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas, kompensasi (*reward and punishment*), dan kesejahteraan pegawai;

- b. Peningkatan kemampuan teknis SDM perencana, Litbang dan analis kebijakan publik;
- c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dengan memberikan tunjangan perencanaan bagi pegawai BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

### **2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Berdasarkan tugas dan fungsinya serta hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dan Renstra BAPPEDA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, serta hasil analisis terhadap KLHS, Bappeda dihadapkan pada beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda antara lain:

1. Adanya Regulasi baru mengenai Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran.
2. Semakin tingginya tuntutan untuk menyusun dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan konsisten atau sejalan dengan penganggaran, dengan basis kewilayahan (spasial) yang tepat dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional;
3. Meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi yang harus digunakan dalam penyusunan perencanaan dan data informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
4. Ketersediaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai referensi dalam pengambilan suatu kebijakan;

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

3. Terbitnya Regulasi Pemukhtahiran terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Adanya komitmen *Policy by research* (Kebijakan harus berdasarkan hasil riset);
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPEDA.

**Tabel II.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Rutin)					Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Rutin)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip PD	83,33	192.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip PD	83,33	192.000.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	192.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	192.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	80.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	90.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	90.000.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	15.894.000.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	15.894.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	11.025.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	11.025.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	11.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	11.000.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13	15.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	5.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah BMD yang Teradministrasi Sesuai dengan Peraturan	403	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah BMD yang Teradministrasi Sesuai dengan Peraturan	403	5.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	5.000.000
	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	80	200.000.000	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	80	200.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	200.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	80	1.485.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	80	1.485.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	40.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	250.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	60.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	60.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	250.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	100.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	45.000.000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	700.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	17	1.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	17	1.000.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	250.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10	350.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10	350.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1.284.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1.284.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	40.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	220.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.024.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.024.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusun Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Yang dipelihara	231	895.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusun Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Yang dipelihara	231	895.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	125.000.000
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	50.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210	270.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210	270.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350.000.000
	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Perencanaan)					Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Perencanaan)				

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100	Rp2.650.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100	Rp2.650.000.000
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4	Rp1.700.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4	Rp1.700.000.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan IsuStrategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1	150.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan IsuStrategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1	150.000.000
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	400.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	400.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	300.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	300.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	300.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	300.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	350.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1	350.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2	200.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	2	200.000.000
	Provinsi		(RPJPD/RPJMD/RKPD)			Provinsi		(RPJPD/RPJMD/RKPD)		

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Rp350.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Rp350.000.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	100.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	100.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80	150.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80	150.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40	100.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40	100.000.000
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Sistem Informasi di Bidang Pembangunan Daerah yang implementasikan	3	Rp600.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Sistem Informasi di Bidang Pembangunan Daerah yang implementasikan	3	Rp600.000.000
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	300.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	300.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	200.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	00.000.000
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1	100.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1	100.000.000
			Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	75	Rp550.000.000			Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	75	Rp550.000.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	22	Rp550.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	22	Rp550.000.000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	200.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	200.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	150.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	150.000.000
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	14	200.000.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	14	200.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Rp850.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Rp850.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan	21	Rp350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan	21	Rp350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia	26	Rp500.000.000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia	26	Rp500.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	150.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusian	6	350.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusian	6	350.000.000
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Rp700.000.000			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Rp700.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian	17	Rp350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian	17	Rp350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	13	Rp350.000.000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	13	Rp350.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	200.000.000
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Rp700.000.000			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Rp700.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	7	Rp350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	7	Rp350.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahan	11	Rp350.000.000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahan	11	Rp350.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	1	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	1	200.000.000
			Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90	Rp400.000.000			Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90	Rp400.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan	10	Rp200.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pemerintahan	10	Rp200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	10	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia	10	Rp200.000.000			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Pembangunan Manusia	10	Rp200.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10	200.000.000
			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90	Rp400.000.000			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90	Rp400.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian	8	Rp200.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Perekonomian	8	Rp200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	6	Rp200.000.000			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	6	Rp200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6	200.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	90	Rp400.000.000			Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	90	Rp400.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	3	Rp200.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya		Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Infrastruktur	3	Rp200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	200.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahannya	5	Rp200.000.000			Jumlah Laporan Hasil Monev Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Kewilayahannya	5	Rp200.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahannya	5	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahannya	5	200.000.000
	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Penelitian)					Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Penelitian)				
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan	80	Rp1.750.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan	80	Rp1.750.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4	Rp625.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4	Rp625.000.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	150.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	150.000.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	150.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	150.000.000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1	200.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1	200.000.000
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	125.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	125.000.000
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	6	Rp1.125.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	6	Rp1.125.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	200.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	300.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	200.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	125.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	125.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	150.000.000
			Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	80	Rp1.700.000.000			Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	80	Rp1.700.000.000
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	8	Rp1.000.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	8	Rp1.000.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	125.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	125.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1	125.000.000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1	125.000.000

KODE	RANCANGAN AWAL					HASIL EVALUASI KEBUTUHAN				
	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	150.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi	6	Rp700.000.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi	6	Rp700.000.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	3	200.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	3	200.000.000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan pelaksanaan program/kegiatan ada di PD sesuai dengan sektornya masing-masing.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Renja Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Sumber:

Usulan program dan kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang terkait dengan fungsi Penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian disajikan dalam tabel 2.5 dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Renja Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	POKIR DPRD				
	a. Belum otimalnya rumusan hasil dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Jl. Raya Manggar - Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung,	-	-	Diteruskan ke PD terkait
	b. Belum optimalnya hasil inovasi daerah yang dikembangkan	Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung	-	-	Diteruskan ke PD terkait

Sumber:

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, e. Renstra BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta f. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan serta selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan renja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024 tema pembangunan nasional tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Hal ini juga selaras dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yaitu **"Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi"**.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, **Prioritas Pembangunan** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

Priotitas Pembangunan Utama:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pembangunan Demokrasi

Prioritas Pembangunan Pendukung:

1. Pembangunan Pemerintah
2. Pembangunan Wilayah
3. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2023, prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2021 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada RENSTRA BAPPEDA tahun 2017-2022, maka rencana program dan kegiatan BAPPEDA tahun 2024 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA BAPPEDA.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka tujuan penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kinerja perencanaan sebagai upaya mencapai target kinerja BAPPEDA;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
3. Mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1

Sasaran dan Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	93%	93%
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	92%	92%

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Bappeda tahun lalu dan hasil evaluasi renja Bappeda tahun berjalan maka Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 mengusulkan anggaran Belanja dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp26.470.548.455 ,00,- yang terdiri dari 4 Program 19 Kegiatan dan 74 Sub kegiatan. Adapun Nomenklatur Program dan Kegiatan tersebut berdasarkan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

#### **A. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN**

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    1. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
    2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik;
    3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
    4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
    5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
    6. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
  - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

1. Sub Kegiatan Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
  3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi;
  2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  3. Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
1. Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
  2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
  3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Provinsi;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
  3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
  4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
  6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
  3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
  4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;

6. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.
  1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
  3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya;

## B. FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### 1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
  2. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
  3. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;

1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
  1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial;
  2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
  1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindutrian dan Perdagangan;
  3. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
  4. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
  6. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
  1. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
  2. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang .

#### C. RUTIN

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
  6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
  4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
  8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					1 Dokumen	286.501.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		286.501.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	88.106.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		88.106.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	170.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		170.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	303.107.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		303.107.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	1.936.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		686.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			1 Laporan 1 Laporan	130.809.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai	-	130.809.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														32.909.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														57.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														40.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	-			40 Orang	40.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		291.789.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														40.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					1 Dokumen	122.449.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		122.449.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi					1 Dokumen	52.044.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		52.044.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Percentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Percentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Percentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Percentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90% 100% 100% 100% 100% 90% 90%			90 % 90 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 %	1.159.999.892,00							90% 100% 100% 100% 100% 90% 90%	1.226.000.000,00		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					2 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi	Stakeholder dan Pegawai		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					16 Dokumen	60.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi	Stakeholder dan Pegawai		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					4 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi	Stakeholder dan Pegawai		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					2 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi	Stakeholder dan Pegawai		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah				20 Laporan	93.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Wilayah	Stakeholder dan Pegawai		102.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.494.000.000,00							1.895.000.000,00			
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	85% 80%			80 % 80 %	1.494.000.000,00						80% 80%	1.895.000.000,00			
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			4 Laporan	210.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan																
			Jumlah Dokumen Data Kelitbang dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	Stakeholder dan Pegawai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-			6 Laporan	420.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Stakeholder dan Pegawai	-	525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Stakeholder dan Pegawai		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Stakeholder dan Pegawai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Ekonomi	Stakeholder dan Pegawai		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Stakeholder dan Pegawai		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					40 Laporan	41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	-	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pemerintahan	-	58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	<b>J U M L A H</b>						<b>26.470.548.455,00</b>							<b>23.123.799.700,00</b>				

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dimana berpedoman pada renstra Bappeda untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju serta berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Bappeda tahun lalu dan hasil evaluasi renja Bappeda tahun berjalan agar dapat memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan renja bappeda dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi yang telah tertuang dalam Renstra Bappeda, dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renja tahun 2024 ini setelah disempurnakan, kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pangkalpinang, 2023

KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,





**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,  
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang  
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336